

## **PENGARUH PENGAWASAN KEUANGAN, SUMBER DAYA MANUSIA, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PENGENDALIAN INTERN TERHADAP NILAI INFORMASI PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABANAN**

Ni Wayan Landya Dewi dan I Gusti Ayu Intan Saputra Rini

Fakultas Ekonomi Universitas Warmadewa

intansaputrarini@gmail.com

Diterima: 08/05/2018

Direvisi: 09/06/2018

DiPublikasi: 30/07/2018

DOI: <http://dx.doi.org/10.22225/kr.10.1.713.63-69>

### **Abstract**

*This research entitled "Influence of Financial Supervision, Human Resources, Information Technology, and Internal Control Against Value of Financial Reporting Information of Local Government of Tabanan Regency". In this study the formulation of the problem is "Are the financial supervision, human resources, information technology and internal control affect the value of financial reporting information of the Tabanan regency?". The purpose of this study is to determine the influence of financial supervision, human resources, information technology and internal control of the financial reporting information of the District of Tabanan. The population in this study are employees in the accounting or financial administration of Dinas-Dinas in Kabupaten Tabanan. Data collection method used is with questionnaire. The number of questionnaires distributed was 89 (100%) and returned and can be processed as much as 70 (78.6%). Analytical technique used is with partial least square. The data has been collected and processed using SmartPLS 2.0 software. The result of the analysis, it is found that (1) financial control variables have an insignificant relationship to the value of information, it is shown from the t-statistics value of 0.86 is smaller than t-table (1.96). (2) Human resource variable has an insignificant relationship to the value of information, it is shown from the t-statistics value of 0.55 which is smaller than t-table (1.96). (3) Information technology variables have an insignificant relationship to the value of information, it is shown from the value of t-statistics 0.15 which is more than t-table (1.96). (4) Internal control variable has significant relation to the value of information, it is shown from t-statistics value of 12,92 which is bigger than t-table (1,96).*

**Keywords:** *Financial Supervision, Human Resources, Information Technology, Internal Control, Value of Local Government Financial Reporting Information.*

### **Abstrak**

Penelitian ini berjudul "Pengaruh Pengawasan Keuangan, Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan". Dalam penelitian ini yang menjadi perumusan masalah adalah "Apakah pengawasan keuangan, sumber daya manusia, teknologi informasi dan pengendalian intern berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan daerah Kabupaten Tabanan?". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengawasan keuangan, sumber daya manusia, teknologi informasi dan pengendalian intern terhadap nilai informasi pelaporan keuangan Daerah Kabupaten Tabanan. Populasi pada penelitian adalah pegawai pada bagian akuntansi atau penatausahaan keuangan pada Dinas-Dinas di Kabupaten Tabanan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan kuesioner. Jumlah kuesioner yang disebar adalah sebanyak 89 (100%) dan yang kembali dan dapat diolah sebanyak 70 (78,6%). Teknik analisis yang digunakan adalah dengan partial least square. Data yang telah dikumpulkan lalu diolah dengan menggunakan software SmartPLS 2.0. Hasil dari analisis yang dilakukan, didapat bahwa (1) Variabel pengawasan keuangan memiliki hubungan yang tidak signifikan terhadap nilai informasi, hal ini ditunjukkan dari nilai t-statistics sebesar 0,86 yang lebih kecil dari t-tabel (1,96). (2) Variabel sumber daya manusia memiliki hubungan yang tidak signifikan terhadap nilai informasi, hal ini ditunjukkan dari nilai t-statistics sebesar 0,55 yang lebih kecil dari t-tabel (1,96). (3) Variabel teknologi informasi memiliki hubungan yang tidak signifikan terhadap nilai informasi, hal ini ditunjukkan dari nilai t-statistics 0,15 yang lebih dari t-tabel (1,96). (4) Variabel pengendalian intern memiliki hubungan yang signifikan terhadap nilai informasi, hal ini ditunjukkan dari nilai t-statistics sebesar 12,92 yang lebih besar dari t-tabel (1,96).

**Kata kunci :** *Pengawasan Keuangan, Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Pengendalian Intern, Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.*

### **I. PENDAHULUAN**

Perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini ditandai dengan menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga – lembaga publik, baik di pusat maupun

daerah, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintah yang diatur dalam Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yaitu upaya

konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyamakan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang merupakan prasyarat normatif sebagaimana disebutkan dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) antara lain: (1) relevan, (2) andal, (3) dapat dibandingkan, dan (4) dapat dipahami.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ariesta (2013), Armando (2013) dan Adnyani (2015) bahwa ada banyak hal yang mempengaruhi nilai informasi suatu pelaporan keuangan pemerintah daerah diantaranya pengawasan keuangan daerah, sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi.

Fenomena pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Kenyataannya di dalam laporan keuangan pemerintah masih banyak disajikan data-data yang tidak sesuai. Selain itu juga masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah. Dalam UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Menteri Keuangan berhak menunda penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) bila pemerintah daerah (pemda) belum menyerahkan laporan sistem keuangan daerah, termasuk APBD.

Dalam laporan keuangan pemerintah khususnya daerah Bali masih banyak disajikan data-data yang tidak sesuai. Selain itu juga masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam pelaksana audit laporan keuangan pemerintah. Pada tanggal 13 september 2013 Menteri Keuangan Republik Indonesia menerbitkan surat peringatan keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2012 ke 262 pemerintah daerah dan Gubernur Bali termasuk salah satu yang mendapat peringatan keterlambatan pengiriman Hardcopy APBD TA Tahun 2012 (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2013). Temuan atas sitem pengendalian intern, di kebijakan akuntansi untuk penyisihan piutang tak tertagih sehingga piutang yang disajikan tidak menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan minimal sebesar Rp 1,1 miliar. Bendahara pengeluaran terlambat menyetor sisa uang persediaan tahun anggaran 2011 sebesar RP 574,05 juta dan lebih menyetorkan sisa hasil uang persediaan sebesar Rp 6,76 juta (Antara News 2012).

Di Kabupaten Tabanan BPK juga pernah memberikan opini *disclaimer* atas hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tabanan tahun anggaran 2012 (BPK,2012). Selain itu BPK juga masih menemukan beberapa kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan dalam pengelolaan dana pendidikan Sekolah pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tidak melalui mekanisme APBD.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dilakukan penelitian dengan judul : “Pengaruh Pengawasan Keuangan, Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan”

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- Apakah pengawasan keuangan berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah?
- Apakah sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan daerah?
- Apakah teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah?
- Apakah pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah?

Berdasarkan uraian rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- Pengaruh pengawasan keuangan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.
- Pengaruh sumber daya manusia terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.
- Pengaruh teknologi informasi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.
- Pengaruh pengendalian intern terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Teori Keagenan (Agency Theory)

Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Zuliarti (2012), Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu orang atau lebih (*principal*) memerintah orang lain (*agent*) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi *principal*.

Berkaitan dengan masalah keagenan, praktek pelaporan keuangan dalam organisasi sektor publik merupakan suatu konsep yang didasari oleh teori

keagenan. Dalam pelaporan keuangan, pemerintah yang bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai *principal* dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik.

### B. Pengawasan Keuangan

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber data organisasi atau pemerintah telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan organisasi atau pemerintah (Handoko, 2014 : 358).

### C. Sumber Daya Manusia

Perencanaan sumber daya manusia akan dapat dilakukan dengan baik dan benar jika perencanaannya mengetahui apa dan bagaimana sumber daya manusia itu. Sumber daya manusia atau *man power* disingkat SDM merupakan kemampuan yang dimiliki setiap manusia. SDM terdiri dari daya pikir dan daya fisik setiap manusia. Tegasnya kemampuan setiap manusia ditentukan oleh daya pikir dan daya fisiknya. Sumber daya manusia menjadi unsur pertama dan utama dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Peralatan yang andal atau canggih tanpa peran aktif SDM, tidak berarti apa-apa (Hasibuan, 2008 : 244).

### D. Teknologi Informasi

Teknologi informasi adalah suatu alat yang mempermudah untuk melakukan pemrosesan transaksi dan data lebih cepat. Menurut Jurnal dan Supomo (2002) pemanfaatan teknologi informasi merupakan tingkat integrasi teknologi informasi pada pelaksanaan tugas-tugas akuntansi. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup adanya: Pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negeri ini (Hamzah, 2009). Teknologi informasi meliputi computer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), *database*, jaringan (*internet, intranet*), *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Arfianti, 2011). Pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya (Winidyaningrum, 2010) Pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik, dan Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat.

### E. Pengendalian Intern

Pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keterandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan dipatuhinya kebijakan pimpinan. Menurut tujuannya, pengendalian intern dapat dibagi menjadi dua yaitu pengendalian intern akuntansi (*internal accounting control*) dan pengendalian intern administratif (*internal administrative control*).

### F. Nilai Informasi

Agar manfaat dan tujuan penyajian laporan keuangan pemerintah dapat dipenuhi maka informasi yang disajikan harus merupakan informasi yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Mengatakan bahwa informasi harus bermanfaat bagi para pemakai saja dan mengatakan bahwa informasi harus mempunyai nilai (Suwardjono, 2005 : 81).

Menurut Wahyono, 2004 (dalam Harifan. 2009) dalam menghasilkan suatu informasi yang bernilai (dapat dipahami) di sini menyangkut dua elemen pokok, yaitu informasi yang dihasilkan dan sumber daya yang menghasilkan.

### G. Kerangka Pemikiran

Agar suatu laporan keuangan memiliki nilai dan berkualitas tentunya informasi yang terkandung dalam laporan tersebut dapat bermanfaat bagi para pemakainya. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas tentu memerlukan sumber daya manusia yang kompeten. Pemanfaatan teknologi informasi juga tak lepas dalam penyusunan laporan keuangan.

Maka dari itu diperlukan sistem pengendalian intern akuntansi untuk membantu dalam mencapai tujuan suatu organisasi. Oleh sebab itu perlu dilakukan adanya pengawasan keuangan daerah untuk menghindari adanya penyimpangan sehingga informasi keuangan yang dihasilkan valid dan relevan. Kerangka Pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat dalam gambar berikut:

Gambar 1

Kerangka Pemikiran

Pengaruh Pengawasan Keuangan, Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan



Sumber : Data Diolah

### III. METODE PENELITIAN

Populasi pada penelitian ini adalah pegawai pada bagian akuntansi atau penatausahaan keuangan pada Dinas-Dinas di Kabupaten Tabanan berjumlah 115 orang. Jumlah populasi yang sekaligus menjadi sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah pegawai dari 15 Dinas yang terdapat di Kabupaten Tabanan.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuesioner yang berupa serangkaian pernyataan yang diajukan kepada responden. Alat analisis yang digunakan adalah *Partial Least Square* (PLS).

Adapun beberapa variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian di tarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014 : 2). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

Variabel Independen adalah variabel yang menyebabkan atau mempengaruhi, yaitu faktor-faktor yang diukur, dimanipulasi atau dipilih oleh peneliti untuk menentukan hubungan antara fenomena yang diobservasi atau diamati. Adapun variabel bebas dalam penelitian ini adalah pengawasan keuangan daerah (X1), sumber daya manusia (X2), pemanfaatan teknologi (X3), dan pengendalian intern akuntansi (X4).

Variabel Dependen adalah faktor-faktor yang diobservasi dan diukur untuk menentukan adanya pengaruh variabel bebas, yaitu faktor yang muncul, atau tidak muncul, atau berubah sesuai dengan yang diperkenalkan oleh peneliti. Adapun variabel terikat dalam penelitian ini adalah nilai informasi (keandalan dan ketepatanwaktuan) pelaporan keuangan pemerintah daerah (Y).

### IV. PEMBAHASAN

Pengujian secara statistik setiap hubungan yang dihipotesiskan dilakukan dengan menggunakan simulasi dalam *Partial Least Square* (PLS). Dilakukan metode *bootstrapping* terhadap sampel dalam hal ini.

Pengujian dengan *bootstrapping* juga dimaksudkan untuk meminimalkan masalah ketidak normalan data penelitian. Hasil Pengujian dengan *bootstrapping* dari analisis *Partial Least Square* (PLS) adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Pengawasan Keuangan terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan.

Pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa hubungan pengawasan keuangan dengan nilai informasi menunjukkan nilai *Original Sample* (O) sebesar 0,05 dengan nilai *T-Statistics* sebesar 0,86. Nilai tersebut lebih kecil dari t-tabel (1,96). Hasil ini menunjukkan bahwa pengawasan keuangan berpengaruh positif sebesar 0,05 terhadap nilai informasi dan hubungan tersebut tidak signifikan pada level 0,05, karena nilai *T-Statistics* lebih kecil dari 1,96 yakni sebesar 0,86. Hal ini berarti Hipotesis 1 ditolak. Alasan penolakan hipotesis ini diduga karena penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN pada pemerintah daerah Kabupaten Tabanan belum dilakukan secara efektif dan efisien dan pengawasan yang dilakukan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi belum sesuai dengan tolok ukur atau standar yang telah ditetapkan apabila ditemukannya adanya penyimpangan, kekliruan, serta pemborosan hal ini tidak dapat segera diatasi. Hal ini terlihat dari data statistik deskriptif konstruk pengawasan keuangan yang menunjukkan hasil bahwa dari 70 responden persepsi rata-rata respon responden untuk indikator pemerintah bersih dan bebas KKN mendapatkan persepsi paling rendah dari rata-rata sebesar 4,29 dan persepsi rata-rata untuk indikator sistem pengawasan pelaksanaan tugas dengan rata-rata 4,30. Penelitian ini bertentangan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Armando (2013) dan Adnyani (2015).

2. Pengaruh Sumber Daya Manusia terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan.

Pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa hubungan variabel sumber daya manusia dengan nilai informasi menunjukkan nilai *Original Sample* (O) sebesar 0,04 dengan nilai *T-Statistics* sebesar 0,55. Nilai tersebut lebih kecil dari t-tabel (1,96). Hasil ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif sebesar 0,04 terhadap nilai informasi dan hubungan tersebut tidak signifikan pada level 0,04, karena nilai *T-Statistics* lebih kecil dari 1,96 yakni sebesar 0,55. Hal ini berarti Hipotesis 2 ditolak. Alasan penolakan hipotesis ini diduga karena kondisi sub bagian akuntansi atau penatausahaan keuangan yang belum mendukung. Sumber daya manusia di sub bagian akuntansi atau penatausahaan keuangan yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan belum mencukupi, baik dari sisi jumlah maupun kualifikasinya. Dari sisi jumlah, satuan kerja yang ada hanya memiliki sedikit pegawai akuntansi. Sedangkan dari sisi kualifikasi, sebagian besar pegawai sub bagian

akuntansi atau penatausahaan keuangan tidak memiliki latar pendidikan akuntansi. Uraian tugas dan fungsi sub bagian akuntansi atau penatausahaan keuangan yang ada juga masih terlalu umum (belum terspesifikasi dengan jelas). Padahal fungsi dan proses akuntansi hanya dapat dilaksanakan oleh pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang ilmu akuntansi. Namun secara praktik kondisinya berbeda. Karena masih sangat sedikit jumlah akuntan atau pegawai yang berlatar pendidikan akuntansi, sementara peraturan perundang-undangan telah mewajibkan setiap satuan kerja untuk menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan, maka pegawai yang ada yang diberdayakan. Kelemahan yang ada diimbangi dengan mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah. Hal ini terlihat dari data statistik deskriptif konstruk sumber daya manusia yang menunjukkan hasil bahwa dari 70 responden persepsi rata-rata respon responden untuk indikator latar belakang pendidikan mendapatkan persepsi paling rendah dari rata-rata sebesar 3,94 dan indikator peran dan tanggungjawab dengan rata-rata sebesar 4,11. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Indriasari dan Nahartyo (2008).

3. Pengaruh Teknologi Informasi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan.

Pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa hubungan variabel sumber teknologi informasi dengan nilai informasi menunjukkan nilai *Original Sample* (O) sebesar 0,01 dengan nilai *T-Statistics* sebesar 0,15. Nilai tersebut lebih kecil dari t-tabel (1,96). Hasil ini menunjukkan bahwa teknologi informasi berpengaruh positif sebesar 0,01 terhadap nilai informasi dan hubungan tersebut tidak signifikan pada level 0,01, karena nilai *T-Statistics* lebih kecil dari 1,96 yakni sebesar 0,15. Hal ini berarti Hipotesis 3 ditolak. Alasan penolakan hipotesis ini diduga karena sub bagian akuntansi dan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan belum memiliki teknologi informasi pendukung yang cukup dalam melaksanakan tugas. Teknologi informasi yang tidak atau belum dimanfaatkan secara optimal, dan pengimplementasian teknologi informasi yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga implementasi teknologi informasi menjadi sia-sia dan semakin mahal dan tidak dapat mendukung penyajian laporan keuangan yang handal. Belum adanya jadwal pemeliharaan peralatan secara teratur sehingga peralatan yang usang atau rusak tidak didata dan diperbaiki tepat pada waktunya. Hal ini terlihat dari data statistik deskriptif konstruk teknologi informasi yang menunjukkan hasil bahwa dari 70 responden persepsi rata-rata respon responden untuk indikator tersedianya komputer dalam jumlah cukup mendapatkan persepsi paling rendah dari rata-rata sebesar 3,99, indikator jaringan internet sebagai

penghubung antar unit kerja dengan rata-rata 3,97, indikator jadwal pemeliharaan peralatan teratur dengan rata-rata 3,79 dan indikator perbaikan peralatan yang rusak atau usang dengan rata-rata 3,70. Penelitian ini bertentangan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ariesta (2013) dan Andnyani (2015).

#### 4. Pengaruh Pengendalian Intern terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan.

Pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa hubungan variabel pengendalian intern dengan nilai informasi menunjukkan nilai *Original Sample* (O) sebesar 0,85 dengan nilai *T-Statistics* sebesar 12,92. Nilai tersebut lebih besar dari t-tabel (1,96). Hasil ini menunjukkan bahwa pengendalian intern berpengaruh positif sebesar 0,85 terhadap nilai informasi dan hubungan tersebut signifikan pada level 12,92, karena nilai *T-Statistics* lebih besar dari 1,96 yakni sebesar 12,92. Hal ini berarti Hipotesis 4 diterima. Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sistem pengendalian intern yang dilaksanakan secara optimal dan terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai, akan memberikan keyakinan memadai atas tercapainya kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil Penelitian ini Konsisten dengan penelitian yang dilakukan Ariesta (2013) dan Armando (2013).

## V. SIMPULAN DAN SARAN

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengawasan keuangan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap nilai informasi. Hal ini karena penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN pada pemerintah daerah Kabupaten Tabanan belum dilakukan secara optimal.
2. Sumber daya manusia berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap nilai informasi. Hal ini karena sumber daya manusia di sub bagian akuntansi atau penatausahaan keuangan yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan belum mencukupi, baik dari sisi jumlah maupun kualifikasinya.
3. Teknologi informasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap nilai informas. Hal ini karena teknologi informasi yang tidak atau belum dimanfaatkan secara optimal, dan pengimplementasian teknologi informasi yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga implementasi teknologi informasi menjadi sia-sia dan semakin mahal dan tidak dapat mendukung penyajian laporan keuangan yang handal

4. Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai informasi. Sistem pengendalian intern yang dilaksanakan secara optimal dan terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai, akan memberikan keyakinan memadai atas tercapainya kegiatan yang efektif dan efisien.

### B. Saran

Berdasarkan keterbatasan dalam penelitian ini, beberapa saran yang perlu diperhatikan oleh aparat SKPD Kabupaten Tabanan serta untuk penelitian kedepan adalah sebagai berikut:

Bagi SKPD Kabupaten Tabanan

Proses pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan disarankan untuk lebih memperhatikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki dan didukung dengan pengawasan keuangan yang lebih efektif, pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin, dan adanya sistem pengendalian intern yang memadai, diharapkan pihak pengelola keuangan daerah khususnya bagian akuntansi mampu melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi dengan baik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan menjadi andal dan tepat waktu.

Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan sehingga masih perlu untuk disempurnakan. Penelitian ini menggunakan pengukuran kuesioner yang mungkin menimbulkan bias persepsi, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan metode observasi (pengamatan) secara langsung kepada objek penelitian sehingga hasil yang didapatkan bisa lebih optimal dan untuk menghindari kemungkinan respon bias pada pengisian kuesioner oleh respon.

### Daftar Pustaka

- Ardi Adnyani, Ketut. 2015. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Seluruh Dinas di Kabupaten Jembrana (Studi Empiris Seluruh Dinas di Kabupaten Jembrana). *Skripsi* Universitas Pendidikan Ganesha.
- Arifianti, Dita. 2011. Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Skripsi* Universitas Diponegoro.
- Ariesta, Fadila. 2013. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Pasaman Barat). *Skripsi* Universitas Negeri Padang.
- Armando, Gerry. 2013. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Akuntansi Pemerintah dan Pengawasan

- Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Bukittinggi). *Skripsi Universitas Negeri Padang*.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2014. *Structural Equation Modeling Metode Alternatif dengan Partial Least Square*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handoko, T. Hani. 2014. *Manajemen*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM.
- Hasibuan, Drs. H. Malayu S.P. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2001. *Standar Profesional Akuntansi Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indriasari, Desi dan Ertambang Nahartyo, 2008, *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Palembang Kabupaten Ogan Ilir)*. SNA Pontianak, tahun 2008.
- Mardiasmo. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nordiawan, Deddi. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern.
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Bisnis*. Penerbit Alfabeta, Bandung.